

**KENDALA FAKTOR DISPOSISI DALAM IMPLEMENTASI  
APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA  
(STUDI DI DESA WRINGIN KECAMATAN WRINGIN KABUPATEN  
BONDOWOSO)**

Wahyuni Kartika Asih Anggraini

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Prodi Ilmu Pemerintahan

**ABSTRAK**

Nama : Wahyuni Kartika Asih Anggraini

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul : Kendala Faktor Disposisi dalam Implementasi Aplikasi  
Sistem Keuangan Desa ( Studi di Desa Wringin  
Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso )

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kendala Faktor Disposisi dalam Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian kualitatif. Data – data atau informasi yang diperoleh dari pemerintah desa Wringin melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari pembahasan dalam kendala faktor disposisi dalam implementasi aplikasi keuangan desa ada beberapa aspek yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dalam penerapan sistem aplikasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa terdapat kendala yakni dalam faktor disposisi adanya ketidaksinkronan antara kepala desa dengan staff desa hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan oleh kepala desa serta dalam segi kapasitas SDM perlu ditingkatkan lagi, karena pada saat ini seluruh desa di kabupaten Bondowoso sudah serentak menggunakan aplikasi Siskeudes ini yang berbasis online.

**Kata Kunci :** Kendala, Faktor Disposisi, Sistem Keuangan Desa

## ***ABSTRACT***

*Name:* Wahyuni Kartika Asih Anggraini

*Study program:* Government Science

*Title:* Constraints of Disposition Factors in the Implementation of Village Financial System Applications (Study in Wringin Village, Wringin District, Bondowoso Regency)

This study aims to determine how the Disposition Factor Constraints in the Implementation of Village Financial System Applications in Wringin Village, Wringin District, Bondowoso Regency. The method used in this study is a qualitative research type. Data or information obtained from the Wringin village government through interviews, observations, and documentation. The results of the discussion on the constraints of disposition factors in the implementation of village finance applications have several aspects, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. In the application of the Village Financial System Application system, there are obstacles, namely in the disposition factor of the dissonance between the village head and the village staff, this is caused by a lack of knowledge by the village head and in terms of human resource capacity needs to be improved, because at this time all villages in Bondowoso district have simultaneously using the online-based Siskeudes application.

**Keywords:** Constraints, Disposition Factors, Village Financial System

## **I. PENDAHULUAN**

Menurut Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang memiliki kewenangan dalam mengatur serta mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasar inisiatif masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dalam kerangka sistem pemerintahan NKRI. Desa yang kita ketahui dalam 65 tahun sejak kemerdekaan Republik Indonesia hanya menjadi obyek pembangunan yang pasif serta dalam kenyataannya hanya sebagai penonton pembangunan, untuk saat ini memperoleh pengakuan (rekognisi) atas entitasnya agar menjadi lebih mandiri, berdaulat, demokratis. Dengan adanya pengakuan tersebut, perhatian pemerintah terhadap desa semakin besar yakni dibuktikan dengan adanya tindakan nyata berupa adanya Alokasi Dana Desa dari APBN.

Selain itu, dalam UU desa telah memberi jaminan yang sangat pasti bahwasannya dalam setiap desa dapat memperoleh sebuah dana melalui pemerintah dari anggaran kenegaraan serta tiap daerah yang memiliki jumlah berlipat, jauh dari jumlah anggaran desa yang sudah ada pada saat ini. Tentunya setiap strategi ini mempunyai resiko terhadap proses pengelolaannya yang saat ini harus dan wajib dilaksanakan secara profesional, efektif dan efisien, serta akuntabel yang didasari oleh prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadi KKN.

Sejak berlakunya Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 saat ini desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur serta mengembangkan daerahnya sendiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada serta pemerintah desa diberikan amanat supaya lebih mandiri untuk hal mengurus dan mengelola pengelolaan keuangan desa dari berbagai sumber daya yang dimiliki, termasuk dalam tata kelola keuangan desa serta kekayaan yang dimiliki oleh desa. Dengan adanya peran yang besar ini diharuskan memiliki tanggung jawab yang besar dengan menerapkan prinsip akuntabilitas

dalam pemerintahannya, dimana setiap desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa yang dihasilkan dari pengelolaan keuangan desa.

Dalam pengelolaan keuangan desa terdapat tahapan perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan secara transparansi dan akuntabel. Dalam hal penyusunan dan pengelolaan anggaran kepala desa dibantu oleh badan yang bertugas menetapkan APBDesa sesuai dengan peraturan yang berlaku di setiap daerah. Untuk lebih meyakinkan dan terpercaya dalam keterbukaan serta kejelasan dalam hal mengelola keuangan desa alangkah baiknya jika khususnya masalah keuangan desa ini dilaksanakan dan dikelola oleh aparat desa serta dengan adanya partisipasi dari masyarakat khususnya masyarakat di desa Wringin.

Laporan keuangan disusun untuk penyedia suatu informasi yang lebih efektif serta lebih relevan sebagai media dari transaksi keuangan serta semua kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas ekonomi yang dilaksanakan oleh suatu organisasi pelaporan keuangan. Dengan berjalannya suatu perubahan di instansi keuangan di Indonesia, saat ini membutuhkan untuk dilakukannya suatu perubahan didalam berbagai instansi keuangan supaya dapat berjalan efektif dan lebih baik. Untuk perubahan tahap pertama yaitu perubahan dalam aspek akuntansi pemerintahan dan telah melewati tahap akuntansi, hal itu dapat melahirkan sebuah informasi keuangan dan telah tersedia diberbagai pihak serta dilakukan sesuai yang menjadi tujuan dari masing-masing. Dalam hal ini, pemerintah Bondowoso khususnya desa Wringin menggunakan aplikasi Siskeudes untuk memudahkan pekerjaan daripada menyusun laporan secara manual.

Dari hal itulah, maka pemerintah menciptakan tata kelola keuangan desa yang baik di harapkan pula dapat sesuai dengan Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 dibuatlah suatu sistem informasi yang terkomputerisasi yang akhirnya hal ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah ataupun kendala yang terdapat dalam sebuah desa, dari hal inilah akhirnya dibutuhkan sebuah prosedur yang mampu menjalankan alokasi dari dana desa, namun dalam hal

mendukung pengelolaan serta dalam hal alokasi anggaran dana desa itu serta sangat diperlukan juga SDM yang terampil serta optimal untuk menjalankan sebuah sistem dengan memanfaatkan penggunaan *artificial intelligence* yang akhirnya akan menciptakan suatu Siskeudes, Siskeudes ini sebelumnya sudah dikenal yang bernama SIMDA Desa yaitu aplikasi yang telah dikembangkan oleh BPKP dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Siskeudes ini merupakan sebuah sistem aplikasi yang berfungsi untuk membuat sebuah anggaran, pembukuan, serta untuk melaporkan keuangan desa yang sudah disediakan dari Pemerintah secara gratis.

Penelitian tentang penggunaan aplikasi keuangan desa berbasis artificial intelligence telah dilakukan oleh Ria Angin (2021) yang menekankan pada tantangan yang dihadapi oleh aparat pemerintahan desa dalam menerapkan artificial intelligence dalam sistem keuangan desa. Peneliti lainnya adalah Itok Wicaksono (2021) dengan fokus pada kapasitas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam memperkuat penggunaan artificial intelligence dalam sistem keuangan desa. Kedua penelitian ini menjadi sumber rujukan dalam penelitian ini.

Sementara itu penggunaan artificial intelligence telah digunakan oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan BPKP dalam mengelola keuangan desa melalui sistem aplikasi Siskeudes. Fitur-fitur yang terdapat didalam sistem aplikasi Siskeudes ini telah dirancang secara user friendly dan sederhana untuk memberikan kemudahan pengguna untuk hal mengoperasikan aplikasi Siskeudes ini. Dengan diimplementasikannya Siskeudes ini sangat diharapkan nantinya dapat membantu kinerja dari personel desa tersebut, sehingga kinerja dari aparat desa semakin membaik dan penggunaan dari sistem tersebut dapat lebih efektif.

Di Kabupaten Bondowoso saat ini hampir seluruh desa sudah menggunakan aplikasi sistem keuangan desa ini dalam mengelola keuangan desa yang berasal dari keuangan desa, salah satunya yakni di Desa Wringin ini sendiri. Di desa Wringin sendiri menjadi objek yang menarik diteliti karena dilihat dari letak

geografisnya yang jauh dari kota Bondowoso sehingga banyak penghambat tentang internet ataupun sumber daya manusianya.

### **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana kendala faktor disposisi dalam implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso saat ini”?

### **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: untuk mendeskripsikan kendala faktor disposisi dalam implementasi aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso saat ini.

### **MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi dalam bidang pengelolaan keuangan desa dengan memanfaatkan aplikasi Siskeudes untuk memudahkan dalam pekerjaan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta referensi bagi berbagai pihak khususnya bagi pengelolaan keuangan desa dari beberapa siklus pengelolaan keuangan desa agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat lebih baik, transparan, dan akuntabel.

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pemerintahan pada umumnya dan dapat dijadikan bahan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa dengan memanfaatkan aplikasi Siskeudes di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya sebagai bahan referensi dan dokumentasi di perpustakaan Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Muhammadiyah Jember.
2. Manfaat Praktis : Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi bagi peneliti dalam bidang implementasi pengelolaan keuangan desa

dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

## **II. METODE PENELITIAN**

“Metodologi penelitian” mempunyai asalan dari kata “Metode” yang memiliki arti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu serta “Logos” yang memiliki arti pengetahuan atau ilmu. Metodologi adalah sebuah metode untuk melaksanakan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” merupakan suatu kegiatan untuk mencatat, mencari, menganalisis serta merumuskan hingga menyusun laporannya.

### **2.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif dimana penelitian kualitatif menjadi metode ilmiah yang sering diterapkan serta dilaksanakan dengan sekelompok para ahli dalam aspek ilmu pendidikan serta ilmu sosial. Penelitian kualitatif dilakukan dalam membangun sebuah pengetahuan melalui penemuan serta pemahaman. Penelitian kualitatif merupakan sebuah proses penelitian serta pemahaman yang berdasarkan dengan metode dalam hal menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana implementasi atau penerapan dari aplikasi Siskeudes (di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso, maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

Penelitian tentang kendala faktor disposisi dalam implementasi sistem keuangan desa di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan penelitian kualitatif, hal ini dikarenakan memenuhi karakteristik penelitian kualitatif, utamanya dalam hal mengungkapkan kebenaran data secara mendalam dengan cara observasi, wawancara dan kajian dokumen yang dilakukan kepada informan, tentang bagaimana mereka melakukan kegiatan, untuk apa kegiatan – kegiatan dilakukan dan mengapa mereka

melakukan hal tersebut.

## **2.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Balai Desa Wringin yang berlokasi di Wringin Tengah, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur 68252. Sehubungan dengan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif maka penelitian ini tidak ditentukan batas waktu secara jelas sampai peneliti memperoleh pemahaman yang benar – benar mendalam tentang obyek yang diteliti, namun karena pertimbangan waktu yang terbatas, biaya serta tenaga maka penelitian ini bisa diakhiri serta bisa segera dibuat laporannya, jika dianggap sudah mencapai data serta telah menganalisis data sesuai dengan rancangan.

## **2.3 Informan Penelitian**

Penelitian sebagai instrumen yang pertama dalam penelitian kualitatif, maka harus dilakukan langkah nyata untuk terjun secara langsung ke lokasi penelitian dengan melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

- a) Mengadakan pengamatan serta wawancara takterstruktur yang dipandang lebih mudah serta memungkinkan untuk
- b) Mencari makna di setiap perilaku atau tindakan obyek penelitian, sehingga ditemukan pemahaman orisinal terhadap masalah dan situasi yang bersifat konseptual
- c) Triangulasi, data atau informasi dari satu pihak diperiksa kebenarannya dengan cara memperoleh informasi dari sumber lain. Misalnya dari pihak kedua, pihak ketiga, dan seterusnya dengan menggunakan metode yang berbeda.
- d) Menggunakan perspektif emik, artinya membandingkan pandangan dari segi pendiriannya sendiri. Peneliti tidak memberikan pandangan atas apa yang ada, tidak melakukan generalisasi ketika memasuki lapangan, bahkan seakan-akan tidak mengetahui apapun yang terjadi dilapangan.
- e) Mengadakan analisis dari awal sampai akhir penelitian.

Sehubungan dengan penelitian ini yang memusatkan perhatian terhadap penggunaan sistem aplikasi keuangan desa (Siskeudes) yang dilakukan oleh staf

desa Wringin yang mengerti dengan cara memaksimalkan penggunaan aplikasi Siskeudes ini. Maka secara rinci yang dijadikan subjek penelitian yaitu:

1. Kepala Desa
2. Bendahara Desa
3. Sekretaris Desa
4. Kepala Dusun

#### **2.4 Tahap – Tahap Penelitian**

Dalam metode penelitian tahapan – tahapan penelitian harus dilakukan secara sistematis dan prosedur atau telah terencana. Tahapan tersebut adalah:

- a. Penentuan lokasi penelitian
- b. Penentuan fokus penelitian
- c. Penentuan metode penelitian
- d. Penentuan sumber informasi
- e. Penentuan teknik pengumpulan data
- f. Penentuan metode analisis data

#### **2.5 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam hal pengumpulan data yang konkrit, peneliti melakukan beberapa beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Dalam menggunakan metode observasi carayang paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrument. Format yang di susun berisi item – item tentang kejadian atau tingkah laku yang menggambarkan akan terjadi. Sebagai metode ilmiah observasi (pengamatan) diartikan sebagai pengamatan pencatatan sistematis dari fenomena – fenomena yang diselidiki. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung ke Balai Desa Wringin untuk mengamati keadaan balai desa, kepala desa, para staf desa, fasilitas yang dimiliki dll.

2. Wawancara

Disamping memerlukan waktu yang cukup lama untuk mengumpulkan data, dengan metode interview peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu

dilaksanakan dengan dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan serta yang mewawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yakni mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini agak tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

#### **2.6 Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, baik dilapangan maupun diluar lapangan dengan mempergunakan teknik seperti yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman:

a. Reduksi data, yaitu membuat abstraksi seluruh data yang diperoleh dari seluruh catatan lapangan hasil observasi wawancara dan pengkajian dokumen. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan, mengaharapkan hal – hal penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan dan mengorganisasikan data agar sistematis serta dapat membuat satu simpulan yang bermakna.

Jadi, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan pengkajian dokumen dikumpulkan, diseleksi, dan dikelompokkan kemudian disimpulkan dengan tidak menghilangkan nilai data itu sendiri.

b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Proses penyajian data ini mengungkapkan secara keseluruhan dari sekelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca dan dipahami, yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks

yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini data dapat menggambarkan bagaimana implementasi dari aplikasi Siskeudes ini di Desa Wringin.

c. Kesimpulan dan verifikasi

Data yang sudah diatur sedemikian rupa (dipolakan, difokuskan, disusun secara sistematis) kemudian disimpulkan sehingga makna data dapat ditemukan. Namun, kesimpulan tersebut hanya bersifat sementara dan umum.

### III. PEMBAHASAN

Implementasi merupakan tindakan – tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah di terapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan desa. Berdasarkan surat dari KPK yang manadesadi Kabupaten Bondowoso tepatnya wajib menggunakan Aplikasi Siskeudes dalam perencanaan, realisasi, hingga pertanggungjawaban termasuk juga di Desa Wringin ini.

Tata kelola keuangan desa saat ini tepatnya di Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso sudah menggunakan serta mengaplikasikan aplikasi SISKEUDES. Desa Wringin telah berganti dari yang dahulu masih menginput data keuangan desa menggunakan manual (pembukuan) sekarang sudah beralih memanfaatkan aplikasi SISKEUDES yang sudah berjalan sejak tahun 2017.

Menurut Sekretaris Desa, Bapak Heru Febrianto pada saat pertama menggunakan aplikasi SISKEUDES tentunya kebingungan tetapi pada saat ini mereka merasakan lebih nyaman menggunakan aplikasi ini daripada mereka harus menginput data secara manual. Bapak Heru mengatakan “ Pada saat pertama pakai SISKEUDES masih kebingungan tetapi setelah itu enak kalau dulu masih menghitung sendiri tetapi sekarang sudah langsung bisa otomatis”.

Tahun ini ADD di desa Wringin sekitar 531 juta sedangkan Dana Desanya sampai sekitar 1 Milyar 231 juta. Setelah turun ADD serta DD dari pemerintah, pihak desa melakukan Musrenbangdes bersama dengan BPD membahas mengenai kebutuhan dari setiap desa untuk membagi dananya. Anggaran dari setiap desa tidak sama, tergantung dari kebutuhan dari setiap desa. Menurut bapak Heru

sebagai Sekretaris Desa biasanya musrenbangdes selalu mengundang tokoh desa serta ulama untuk bermusyawarah tentang kebutuhan desa dan biasanya pada saat merealisasikan perbaikan jalan mereka hanya bermasalah bagian tempat saja. Selain itu, pada tahun 2020 seluruh dana desa dari pemerintah harus dipampang

di banner jalan agar masyarakat mengetahui seluruh anggaran dari pemerintah untuk meminimalisir adanya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Berdasarkan penelitian ini, Sekretaris Desa Wringin Bapak Heru Febrianto, mengatakan bahwa telah melakukan pelatihan yakni dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Aplikasi Siskeudes di Desa Wringin dioperasikan oleh staf operator desa Wringin, dalam segi pelaporan keuangan desa kembali kepada sekretaris desa Wringin. Dengan adanya masalah yang terjadi dilapangan dalam proses pengimplementasian Siskeudes ini memang tidak ada kendala yang berarti terdapat kelebihan dan kekurangan dalam aplikasi ini, sehingga disinalah peran dari seorang bendahara untuk mengatasi agar pengimplementasian Siskeudes ini dapat digunakan secara lancar dan desa dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akuntabel.

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan komitmen pelaksana terhadap program. Struktur birokrasi didasarkan pada prosedur operasional standar yang mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Sumiati selaku kepala Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso pada tanggal 26 April 2021 :

“Untuk hal kepatuhan para staff atau pegawai di kantor desa ini sudah sangat baik dan bagus dalam implementasi segala tugas yang diberikan oleh saya dik. Tetapi, dalam hal insentif untuk pegawai tidak ada jika di desa, kalau honor mereka sudah ada dari dinas yang sudah tercantum di aplikasi siskeudes ini. Hal ini karena sekarang semua laporan seperti SPJ ataupun OMSPAM semuanya melalui aplikasi Siskeudes. Dengan adanya aplikasi dik, sangat memudahkan interaksi antara pusat dengan desa hanya tinggal meng klik saja dan masyarakat juga bisa mengetahui.”

Hal senada juga disampaikan oleh Heru Febrianto pada tanggal 26 April 2021 selaku sekretaris Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso:

“Dari segi kepatuhan perintah menurut kami para staff atau anggota disini sudah bagus dan selalu mendukung untuk keberhasilan program ini dik. Untuk hal insentif atau penghargaan setiap tahunnya tergantung masing – masing dik. Soalnya gini, kita aja insentif perangkat desa diambil dari sewa tanah kas desa. Ya mungkin gini, perangkat kerja administrasi punya rezeki pasti kita dikasih tetapi tidak ada insentif khusus. Karena sudah ada di anggaran honor perangkat disamping itu jika ada rezeki maka akan diberi. Baik itu honor perangkat, pelaksana, anggaran atau belanja desa harus masuk di aplikasi Siskeudes ini.”

Selanjutnya hal ini disetujui pula oleh Anom selaku bendahara Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso pada tanggal 24 April 2021 berkaitan dengan disposisi atau sikap pelaksana dalam lingkup internal kantor desa.

“Benar yang dikatakan oleh mas heru berkaitan dengan kepatuhan staff desa dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dengan aplikasi ini yang mana kita sudah mengetahui dan bisa bertanggungjawab untuk program ini. Serta masalah insentif untuk kita benar itu diambil dari sewa tanah kas desa.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Hj. Sumiati selaku kepala desa, bapak Heru Febrianto selaku sekretaris desa dan bapak Anom selaku bendahara desa dapat disimpulkan bahwa dalam hal kepatuhan para pelaksana implementasi kebijakan (aparatur desa) di kantor desa Wringin ini sudah baik dan terlaksana dengan bagus dan sesuai dengan ketentuan dari pemerintah. Tetapi, dalam hal insentif berupa penghargaan kepada staff ataupun dalam bentuk honor ada ketidak sinkronan antara kepala desa dengan staff desa yang mana dikatakan oleh ibu bahwa di desa wringin tidak ada insentif karena hal berupa honor ataupun segala hal sudah ditetapkan di aplikasi Siskeudes tetapi yang dikatakan oleh bapak anom dan bapak heru bahwa insentif itu ada dan diambilkan dari kas desa. Setelah ditelusuri serta dari yang penulis lihat

dilapangan hal ini dikarenakan kurangnya kompeten dari kepala desa sehingga beberapa urusan yang lebih menghandle yakni sekretaris desa. Hal ini dikarenakan kepala desa saat ini hanya menggantikan almarhum suaminya yakni bapak Hj. Raup sehingga kurang memahami dan kompeten di bidangnya.

Salah satu faktor yang berkaitan dengan kendala faktor disposisi dalam implementasi aplikasi Siskeudes yaitu faktor komunikasi. Faktor komunikasi merupakan suatu program yang hanya bisa dilaksanakan dengan baik jika jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang di sampaikan.

Berikut ini merupakan wawancara peneliti dengan H. Sumiati selaku kepala Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso :

“Yang lebih memahami Bendahara dan Sekretaris Desa kalau saya Cuma mengetahui, kebijakan penuh memang kepala desa tapi yang mengelola dari bendahara dan sekretaris langsung ke pelaksana kegiatan masing – masing. Kita punya kepanjangan dari Perencanaan itu terdapat Musdes. Di Musdes tersebut ada tokoh masyarakat serta pemuda untuk menyampaikannya dan juga melalui banner yang dipaparkan di pinggir jalan desa Wringin. Tetapi, masyarakat awam tidak bisa mengakses untuk aplikasi ini karena aplikasi ini milik desa jadi hanya staff yang bias mengaksesnya.“

Selain itu, berikut merupakan wawancara peneliti dengan Heru Febrianto selaku sekretaris Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso pada tanggal 26 April 2021 :

“Jika pembangunan maka TPK yang melaksanakan pembangunan itu siapa maka dia yang melaksanakan dan bertanggungjawab. Para staff disini sudah paham dalam perencanaan tugas mereka seperti apa. Dalam komunikasi staff disini dengan masyarakat kita ada Musdes dan mengundang masyarakat dalam menetapkan RKP yang dihadiri tokoh masyarakat untuk menampung usulan – usulan serta mengadakan pemberdayaan di musyawarah ini. Dari usulan ini akan dirembukkan dan dimasukkan di Siskeudes apa saja yang jadi keperluan masyarakat. Soalnya gini, kayak sekarang ada tahun ini ada kompor besar untuk di

pemberdayaan, pengajuannya untuk pedagang tempe, tape, yang akan dimasukkan di Siskeudes bagian pemberdayaan. Tetapi dik, yang menjadi faktor penghambat dalam komunikasi antara staff dengan masyarakat yaitu Wringin kan luas tidak semua yang masyarakat usulkan kita penuhi atau usahakan. Sebenarnya hanya begini misalnya mereka bertanya kita jawab seandainya dia mengajukan apa yang di desa belum terealisasikan. Kita menjelaskan kadang tidak terima soalnya begini terkadang ada salah paham karena tidak semua yang mereka ajukan kita realisasikan soalnya kita juga banyak yang dibutuhkan di dusun – dusun yang lain. “

Selanjutnya, yaitu wawancara dengan Anom selaku bendahara Desa Wringin Kecamatan wringin Kabupaten Bondowoso pada tanggal 26 April 2021 yang mana ia menyetujui hal yang disampaikan oleh bendahara desa yaitu :

“ Saya setuju dik dengan apa yang dikatakan oleh mas heru tentang staff yang sudah memahami tugas dan peran masing – masing untuk mengoptimalkan berjalannya aplikasi ini. Disamping itu, komunikasi yang dilakukan oleh aparatur desa dengan masyarakat dengan cara adanya musdes untuk hal pengelolaan keuangan desa yang nantinya akan diinput di aplikasi siskeudes.”

Berikut merupakan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Badrus Sholeh pada tanggal 26 April 2021 selaku salah satu kepala dusun Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso:

“ Dalam hal komunikasi antara aparatur desa dengan masyarakat sejauh ini dik sudah bisa dipahami dan sangat jelas bagaimana proses tentang aplikasi Siskeudes ini. Pertama para aparatur desa menuangkan anggaran dalam bentuk banner di desa pada awal tahun dan akhir tahun. Para staff juga menjelaskan tentang pemerintahan, pembangunan, pembinaan, pemberdayaan dan yang saat ini yakni BLTDD (Bantuan Tunai Langsung Dana Desa). Musdes juga dilakukan pada bulan juli untuk penganggaran RKP yang dituangkan APBD (draf) dan setelah itu baru aparatur desa input di aplikasi Siskeudes ini. Dan yang sekarang tahu, aplikasi Siskeudes ini

sudah online dengan versi 2.03 ke inspektorat”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hj. Sumiati (kepala desa), bapak Heru Febrianto (sekretaris desa), bapak Anom (bendahara desa), serta bapak Badrus Soleh (kasun) dapat disimpulkan bahwa komunikasi tentang siskeudes antara kepala desa dengan staff desa ataupun aparatur desa dengan masyarakat sudah terlaksana masih dikatakan kurang baik. Dikatakan komunikasi kurang baik karena berdasrakan hasil wawancara dan hasil observasi peneliti di lapangan kepala desa hanya mengetahui, kebijakan penuh memang kepala desa tapi yang mengelola dari bendahara dan sekretaris langsung ke pelaksana kegiatan masing – masing yang hal ini dapat mengakibatkan kurangnya memberikan pemahaman dari kepala desa terhadap para staffnya. Dari faktor komunikasi ini juga masih kurang optimal karena masih adanya beberapa kesalahpahaman atau miskomunikai antara para staff desa dengan masyarakat setempat.

Selain faktor komunikasi, faktor lain yang berkaitan dengan kendala faktor disposisi dalam implementasi aplikasi Siskeudes yaitu faktor sumber daya, didalam sumber daya terdapat empat komponen yakni staff yang cukup (mutu serta jumlah), informasi yang dibutuhkan untuk mengambil sebuah keputusan, kewenangan yang cukup untuk melakukan tugas atau tanggung jawab serta fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan. Sumber daya juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapa berwujud, seperti sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Dalam pelaksanaan implementasi aplikasi siskeudes di kantor desa wringin sudah berjalan dengan baik. Jika dilihat dari kenyataannya pula, para staff pelaksana sudah memahami dan mengerti tugas masing – masing baik itu dalam pemahaman kebijakan maupun dalam hal pelaksanaan pembangunan. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan H. Sumiati pada tanggal 26 April 2021

selaku kepala Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso.

“Keuangan dikelola oleh bendahara, dari bendahara langsung ke pelaksana kegiatan dari pembangunan, pelayanan masyarakat seperti posyandu dan lainnya. Dalam penyampaian kebijakan siskeudes mereka sudah paham bahwa keuangan dikelola oleh Bendahara. Dalam hal pelaksanaan jika pembangunan TPK yang melaksanakan pembangunan itu siapa maka dia yang melaksanakan dan bertanggung jawab. Hambatan disaat memberi perintah kepada bawahan hambatannya ya kadang juga kebutuhan manusia tida tahu apa kegiaitan mendadak ataupun secara keluarga kan seperti itu. Entah itu ada apa anaknya sakit itukan tidak dapat diketahui atau direncanakan”.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan oleh ibu Hj. Sumiati selaku kepala desa wringin bahwa para staff pelaksana sudah memahami dalam hal pelaksanaan yang berkaitan dengan tata kelola keuangan desa dengan menggunakan aplikasi siskeudes serta dalam hal kewenangan kepala desa dalam penyampaian informasi yang menjadi faktor penghambatnya yaitu lebih kepada hal kebutuhan pribadi para anggotanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heru Febrianto pada tanggal 26 April 2021 selaku sekretaris Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso:

“Setiap 1 tahun sekali dik, aplikasi siskeudes ini mengalami yang namanya update dik. Tetapi Bukan update, tetapi diganti versinya dan sama saja. Dari tahun 2017 Siskeudes mengalami pergantian versi tetapi isinya saja bahkan lebih enak dengan adanya Siskeudes ini. Fasilitas disini maupun fasilitas yang ada di aplikasi sisekudes sudah terpenuhi dik, bahkan lebih enak. Dengan adanya Siskeudes kita entry 1 kali sudah muncul apa yang kita inginkan. Internet juga disini sekarang sudah enak dan aman dik hanya kadang – kadang tidak bisa karena padam ataupun pohon roboh tetapi jarang sekali. Dengan banyaknya staff dengan SDM yang berbeda – beda jadi dari awal gini, sebelum diangkat juga kita juga sharing. Orang itu kualitasnya seperti apa, lebih baik di kaur apa atau bagian apa. Jadi, jika sudah masuk perangkat desa saya juga lebih enak mengkoordinasi atau memberikan tugas

kepada perangkat. Untuk staff khusus aplikasi ini atau security ada operatornya sendiri dik dik hanya saja memang jarang ada yakni bernama mas Didik Rahman. Tapi, kita memang sering bekerja bersama agar sama – sama kita tahu. Operator, bendahara dan sekdes jadi jika yang satu sakit maka yang lainnya bisa handle.”

Hal ini dibenarkan oleh Anom selaku bendahara Desa Wringin Kecamatan Wringin Kabupaten Bondowoso saat wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2021.

“Benar yang dikatakan mas Heru dik, fasilitas yang ada di desa sejauh ini sudah terpenuhi dan fasilitas yang ada di aplikasi semakin canggih yang dulunya aplikasi ini hanya bisa dengan sistem offline sekarang sudah online jadi lebih memudahkan kita. Staff disini pun menurut saya sudah berpengalaman apalagi beberapa dari perangkat sudah pernah mengikuti pelatihan tentang aplikasi siskeudes ini diantaranya ada saya, mas Heru, dan mas Didik.”

Dari hal yang disampaikan oleh ibu Hj. Sumiati (kepala desa), bapak Heru Febrianto selaku sekretaris desa dan bapak Anom selaku bendahara desa dapat disimpulkan bahwa adanya aplikasi siskeudes ini dari hal yang berkaitan dengan aplikasi, sumber daya, serta kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pelaksanaan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan desa bahwa para staff diberikan tugas atau mengkoordinasi tugas bukan oleh kepala desa melainkan oleh sekretaris desa atau dengan kata lain sekretaris desa yang lebih memahami sumber daya para staff disana serta lebih memiliki otoritas memberikan arahan atau perintah kepada staff yang lainnya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa kepala desa di desa Wringin kurang memiliki kemampuan dalam segi sumber daya yang berkaitan dengan sistem aplikasi keuangan desa dibuktikan oleh peneliti dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan kepala desa, beliau sepertinya kurang memahami serta kurang tegas saat memberikan pernyataan.

## **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kendala faktor disposisi dalam implementasi aplikasi sistem keuangan desa di Desa Wringin. Berdasarkan dari hasil penelitian di atas bahwa masih kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh kepala desa sehingga beliau tidak terlalu paham secara mendalam dalam hal pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa ini. Ternyata yang lebih memahami dan memiliki otoritas memberikan arahan atau perintah kepada staff lain yakni sekretaris desa. Hal ini mengakibatkan adanya ketidaksinkronan antara kepala desa dengan staff desa dikarenakan kepala desa hanya menjadi ikon dan kurang mengawasi kerja yang dilakukan oleh bawahannya. Hal ini dibuktikan oleh hasil pengamatan yang dilakukan peneliti saat wawancara dengan kepala desa beliau kurang tegas bahkan kurang nyambung saat diwawancarai serta saat peneliti memberikan pertanyaan malah disuruh untuk lebih mewawancarai sekretaris desa. Dan benar, saat mewawancarai sekretaris desa, beliau lebih paham tentang penerapan aplikasi sistem keuangan desa.

### **Saran**

Saran peneliti kepada pemerintah terutama kepada pemerintah Desa Wringin ini lebih ditingkatkan lagi pemahaman terhadap aplikasi sistem keuangan desa ini. Jadi, bukan hanya 1 atau 2 orang saja yang memahami pengelolaan keuangan desa tetapi, seluruh staff desa mengetahui serta memahami tentang aplikasi ini. Hal lain yakni lebih ditingkatkan lagi kapasitas SDM kepala desa wringin serta dan lebih ditingkatkan lagi penerapan aplikasi Siskeudes yang berbasis online karena di desa ini bagian penatausahaan di aplikasi Siskeudes belum ada pada saat ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Angin, Ria, 2021. "Artificial Intelligence and Human Resources: A Challenge in Implementing Artificial Intelligence in Village Government, Journal IOP Conference Series: Earth and Environment Series, Vol. 717, Issue 1, 021044, pp.1-5.

- Edward III, George C (edited), 1984, *Public Policy Implementing*, Jai Press Inc, London-England.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.
- Wicaksono, Itok, 2021. "The Capacity of the Jember Regency Community and Village Empowerment Service (DPMD) in Using Artificial Intelligence to Strengthen The Village Financial System, Journal IOP Conference Series: Earth and Environment Series, Vol. 717, Issue 1, 021043, 1-8.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) cet.1 h. 11
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2009) cet.1, h.88
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) h. 229.
- Suwardi Lubis, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Medan: USU Prees, 1987), h.101
- Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 11
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (terj. Tjejep Rohendi Rohidi, (Jakarta: UI-Press, 1992) h.19-19.
- Republik Indonesia.2014. *Undang – Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Garrison, R, N. Eric dan P. Brewer. 2007. *Mangerial Accounting For Managers*. New York: McGraw Hill.
- Hamzah, A. 2015. *Tata Kelola Pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera dan Partisipatoris*. Surabaya: Pustaka.
- Republik Indonesia. 2017. *Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 08 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*
- Hukins, G. 1997. The Importance of Recording Financial Transactions. *Accounting For General Practitioners*. 8 (2): 13-15.
- <https://jatim.antaranews.com/berita/191819/pemkab-bondowoso-gunakan-sistem-aplikasi-pengelolaan-keuangan-desa>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bondowoso](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Bondowoso](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bondowoso)

